



# DISKUSI KELOMPOK

# KELOMPOK 1

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
<b>C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana</b>	C.1. Pengembangan strategi pengurangan risiko bencana	Penilaian berkala terhadap risiko bencana	Kajian risiko perubahan iklim terhadap pembangunan Kota Kupang Kajian potensi bencana di Kupang (sudah ada dan dilakukan per tahun) dan dipublikasikan secara masif
		Menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi yang memadai	Sudah ada rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul Tanggung jawab dunia usaha di pesisir untuk menyediakan jalur evakuasi
		Menerapkan prinsip pembangunan yang berketahanan	Kajian risiko dan dampak pembangunan dan dimasukkan dalam instrumen perizinan
		Pengamanan kawasan tepian pantai	Sepanjang pantai sudah berubah menjadi kawasan ekonomi dan bisnis Aktivitas yang diperbolehkan di sempadan pantai perlu disinkronkan kembali
		Peningkatan kapasitas pemerintah daerah	Target untuk menurunkan indeks risiko --> kapasitas daerah
		<b>Pembangunan sistem informasi kebencanaan</b>	Sistem yang mudah diakses oleh masyarakat Early Warning System yang lebih meluas → didukung oleh Pusdatin yang kuat
		<b>Mitigasi struktural dan non-struktural</b>	<b>Mitigasi struktural dan non-struktural</b> <b>Dapat menjadi rujukan dalam pembangunan</b>
		<b>Mendorong keterlibatan universitas dan lembaga riset dalam mengkaji risiko bencana</b>	Termasuk perusahaan (CSR)

# KELOMPOK 1

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
<b>C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana</b>	C.2. Penggunaan pendekatan proaktif, berbasis risiko, dan masyarakat	Menjadikan warga lokal sebagai aktor pelaksana tanggap bencana	Program kelurahan tangguh bencana dari BPBD Melibatkan kelompok rentan dan penyandang difabilitas
		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana	Program kelurahan tangguh dan sekolah aman bencana dari BPBD
		Menerapkan prinsip 'membangun kembali dengan lebih baik'	Perhatian terhadap kondisi mental anak dan korban bencana Menerapkan prinsip inklusi
		Mendorong pengembangan asuransi bencana	Fokus pada kelompok rentan
		Menggunakan pendekatan akuntabilitas sosial untuk mengurangi risiko bencana	
		Simulasi bencana berbasis masyarakat	
		Memasukkan wawasan bencana dalam kurikulum pendidikan	
		Meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas	
		Mendorong kearifan lokal dalam upaya PRB	
		Penguatan forum PRB	

# KELOMPOK 1

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
<b>C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana</b>	C.3. Aksi iklim di semua tingkatan	Membangun ketahanan dan mengurangi emisi gas rumah kaca	Kajian dampak perubahan iklim
		Menyusun aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal	Program Kampung iklim → perlu ada perbaikan tata kelola (partisipatif dan inklusif) Menggerakkan masyarakat untuk aksi iklim di tingkat lokal (misal menanam bakau) Mewajibkan warga untuk menanam pohon Mengurangi sampah plastik di semua tingkatan (perlu didukung dengan regulasi)
		Mengintegrasikan PRB dan API dalam perencanaan di setiap level	RPJMD sudah ada KLHS → KLHS juga membahas PRB dan API
	C.4. Penguatan Regulasi Kebencanaan	Mendorong dasar hukum untuk implementasi regulasi terkait kebencanaan	Pengesahan dokumen rencana, perizinan, aksi iklim, kebakaran, tata ruang Implementasi rencana kontinjensi khusus ancaman prioritas (puting beliung, tsunami)
		Penegakan Perda	
		Review kebijakan pembangunan	
		Mendorong masterplan pembangunan jangka panjang	

# KELOMPOK 1

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
<b>C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana</b>	C.5 Penanganan konflik sosial	Kajian potensi konflik sosial dan lokasi rawan	
		Memperkuat Forum Komunikasi Umat Beragama	Contoh lain: Forum Kelurahan Siaga
		Peningkatan keterampilan bagi warga lokal	
		Pelibatan tokoh agama ,tokoh masyarakat, dan tokoh adat	
		Penguatan deteksi dini potensi konflik sosial	



# DISKUSI KELOMPOK

## D.1. Proses perencanaan upaya adaptasi dan mitigasi jangka menengah dan jangka panjang

PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
Mendukung analisis dampak dan kerentanan bencana maupun perubahan iklim pada tingkat kota	
<b>Memetakan kebijakan di tingkat lokal (policy mapping) terkait kebencanaan dan perubahan iklim yang terpadu lintas sektor</b>	Perlu meninjau kembali muatan PRB dan API dalam kebijakan nasional dan daerah (RPJP, RPJM, RTRW) untuk mengetahui gap
Mendorong perencanaan mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim responsif <b>kelompok rentan termasuk kelompok MBR, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas</b>	
<b>Memperkuat kapasitas pemda dan masyarakat terkait PRB dan API</b>	Dapat didorong melalui Forum PRB untuk penyadaran partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan
<b>Memperkuat peran masyarakat, dan dunia usaha yang sinergis dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim</b>	
Mendorong kebencanaan dan perubahan iklim sebagai <b>isu prioritas</b> sejak musrenbang kelurahan sehingga terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran	
Mengoptimalkan <del>skema transportasi</del> <b>semua sektor</b> perkotaan <b>secara terpadu dan wilayah sekitarnya</b>	

## D.2. Pengarusutamaan **dan implementasi** pengurangan dan pengelolaan risiko bencana

PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
Mengarusutamakan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana yang holistik	
Mengembangkan mekanisme pemantauan, penilaian, dan pelaporan kemajuan ketahanan kota	
<b>Mereview kembali RTRW dan RPJM terkait kewenangan antar pemda dan keterpaduan RenKon</b>	
<b>Memastikan tercantumnya indikator PRB dan API dalam KLHS, RPJMD, dan RKPD</b>	
<b>Memastikan alokasi penganggaran program pada proses pra, tanggap darurat, dan pasca bencana</b>	
<b>Membentuk Forum PRB di tiap kelurahan rentan bencana yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dan aksi-aksi di tingkat lokal</b>	Aksi di tingkat lokal (tanam bakau, biopori, papan informasi, peta rawan dan evakuasi)
<b>Memperkuat koordinasi Forum PRB lintas tingkatan dan perannya sebagai pengambil keputusan sejak musrenbang kelurahan</b>	Forum PRB untuk mengawal kepentingan dari level kelurahan
<b>Mendorong pelibatan legislatif pada musrenbang kelurahan hingga tingkat kota untuk mendukung program prioritas PRB dan API</b>	



### D.3. Kerja sama dan koordinasi lintas sektor

PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
Melakukan kerja sama terkait investasi infrastruktur perkotaan	
Membagi peran dan tanggung jawab dalam penerapan kebijakan	
Memperkuat kelembagaan BPBD kota sebagai koordinator di bidang penanggulangan kebencanaan	Memastikan posisi kepala BPBD secara hirarkis untuk mengoordinasikan kepala OPD lain
Mendorong kerjasama dengan LSM lokal dan internasional termasuk institusi gereja dalam pendampingan masyarakat dan pendanaan	

### D.4. Penjaminan sumber daya pendanaan

PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
Mendukung akses pendanaan multilateral	
Mengembangkan solusi pembiayaan infrastruktur iklim	
Menciptakan mekanisme keberlanjutan fiscal dan utang di seluruh tingkat pemerintahan	
Mendorong penyampaian proposal forum PRB kepada swasta (CSR)	